

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KENDAL

Pada bab ini penulis akan menjabarkan mengenai gambaran umum dari Kabupaten Kendal baik dari aspek geografi, demografi, sosial ekonomi, dan pemerintahan serta menjelaskan keberadaan Pelabuhan Kendal. Sehingga pada bab ini akan dipaparkan gambaran umum serta deskripsi mengenai lokasi dari penelitian. Bab ini digunakan untuk pembaca agar dapat mengenal lebih detail lokasi dan kondisi dari objek penelitian ini.

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Kendal

2.1.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Kendal merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah sekitar 1.002,23 km². Secara administratif Kabupaten Kendal terdiri dari 20 kecamatan dan 286 desa/kelurahan. Posisi geografis berkisar antara 109° 40' - 110° 18' Bujur Timur dan 6° 32' - 7° 24' Lintang Selatan. Peta Administrasi Kabupaten Kendal dapat dilihat pada gambar 2.1. Batas wilayah Kabupaten Kendal sebagai berikut:

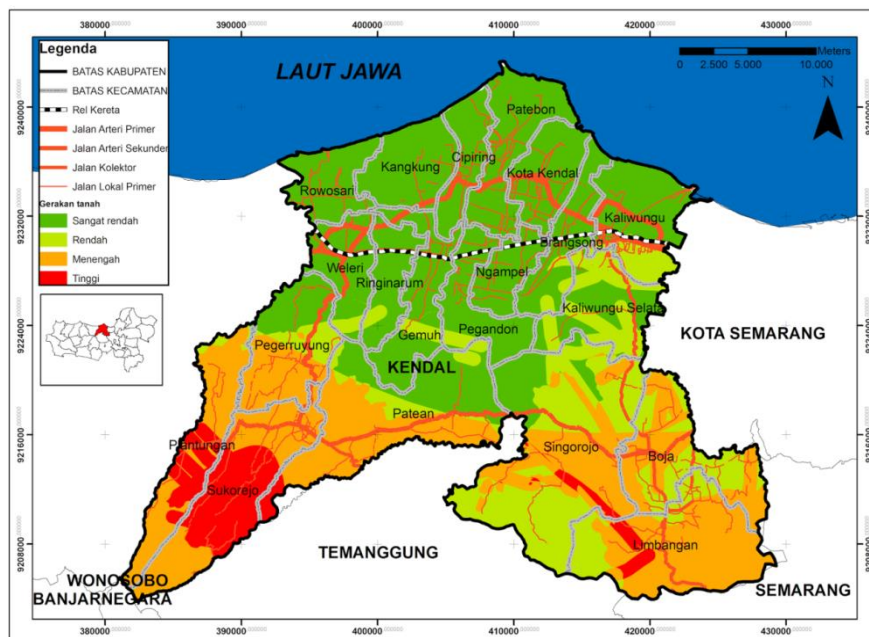
- a. Sebelah Utara: Laut Jawa
- b. Sebelah Timur: Kota Semarang
- c. Sebelah Selatan: Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang
- d. Sebelah Barat: Kabupaten Batang

Kecamatan terbesar adalah Kecamatan Singorojo (119,31 km²) dan Kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Ringinarum (23,50 km²). Kabupaten

Kendal terbagi menjadi 2 daerah yaitu bagian utara merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0-15 mdpl, yang meliputi Kecamatan Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ringinarum, Pegandon, Ngampel, Patebon, Kendal, Brangsong, dan Kaliwungu. Sedangkan bagian selatan merupakan dataran tinggi dengan ketinggian antara 100-641 mdpl. Daerah dari yang tertinggi adalah Kecamatan Plantungan (641 m), Sukorejo (560 m), Patean (536 m), Pageruyung (464 m), Singorojo (460 m), Limbangan (396 m), Boja (312 m), serta Kaliwungu Selatan (120 m).

Gambar 2.1.

Peta Kabupaten Kendal



Sumber: kendalkab.go.id, 2019

Identik dengan tahun sebelumnya, luas wilayah Kabupaten Kendal tahun 2018 ini secara total adalah sebesar 1002,23 km². Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kendal, terlihat

bahwa lahan di Kabupaten Kendal sebagian besar digunakan sebagai lahan pertanian dengan total persentase sebesar 70,36 persen. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Kabupaten Kendal merupakan kabupaten dengan wilayah agraris.

Kabupaten Kendal memiliki 3 titik kecamatan utama yang memiliki potensi besar dan lokasi strategis yang dilewati jalan raya pantura Jawa, yaitu Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Kendal, dan Kecamatan Weleri. Bahkan, ketiga kecamatan tersebut dilewati akses jalan tol nasional dan memiliki 3 gerbang tol di masing-masing kecamatan sehingga dapat dengan mudah diakses melalui jalur darat. Ketiga kecamatan tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-masing sebagai pusat perindustrian, perekonomian, administrasi maupun pemerintahan.

Pertama, Kecamatan Kaliwungu. Kecamatan ini berada di ujung timur Kabupaten Kendal yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang. Kecamatan Kaliwungu dikenal sebagai Kota Santri dikarenakan terdapat puluhan pondok pesantren di kecamatan tersebut. Selain itu, Kaliwungu sangat potensial sebagai pusat perindustrian, dan pusat pemasaran hasil bumi dari dataran tinggi Kendal. Kaliwungu memiliki beberapa perusahaan besar seperti PT. Kayu Lapis Indonesia, PT. Rimba Partikel Indonesia, PT. Asia Pacific Fiber Tbk, PT. Abadi Jaya Manunggal, dan PT. Indogas Raya Utama. Dengan banyaknya perusahaan ini mengakibatkan pendapatan wilayah Kecamatan Kaliwungu tinggi dan tenaga kerja yang terserap akan banyak, sehingga perekonomian di wilayah ini ramai dan

berkembang serta menjadi salah satu kecamatan yang memiliki potensi besar di Kabupaten Kendal.

Kedua, Kecamatan Kendal. Kecamatan ini merupakan ibu kota Kabupaten Kendal sehingga berada di tengah atau pusat dari Kabupaten Kendal itu sendiri. Kecamatan Kendal berperan sebagai pusat administrasi, pemerintahan, dan perekonomian Kabupaten Kendal. Roda pemerintahan Kendal dijalankan di pusat Kecamatan Kendal. Kecamatan Kendal menjadi wilayah perkotaan dimana desa sudah berubah menjadi kelurahan yang diartikan sebagai perangkat dan lurah berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara langsung oleh Bupati Kendal tanpa melalui pemilihan umum. Selain itu, Kecamatan Kendal merupakan daerah pusat pengolahan bandeng presto dan bandeng tanpa duri dimana hal tersebut dapat mendukung perekonomian Kendal.

Ketiga, Kecamatan Weleri. Kecamatan Weleri berada di ujung barat Kabupaten Kendal yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Batang. Kecamatan ini berperan sebagai pusat perekonomian, perbankan, maupun pariwisata. Kecamatan Weleri memiliki Pasar Weleri yang menjadi pusat perekonomian terbesar di Kabupaten Kendal dimana daerah tersebut merupakan titik temu perdagangan dari Kabupaten Batang, Kabupaten Temanggung, Kecamatan Sukorejo dan sekitarnya. Potensi lainnya yang dimiliki Kecamatan Weleri antara lain seperti memiliki Terminal sendiri (Terminal Bahurekso), memiliki stasiun kereta api aktif (Stasiun Weleri), dilewati jalan lingkar, serta memiliki rumah makan-rumah makan besar yang digunakan sebagai tempat istirahat ataupun *rest area* bus-bus dan truk-truk antarkota maupun antarprovinsi.

Kecamatan Weleri juga berperan sebagai pusat pariwisata di Kabupaten Kendal. Hal tersebut didukung dengan adanya tempat-tempat wisata seperti Pantai Sendang Sikucing, Pantai Cahaya, Pantai Sendang Asih, Weleri Sekartama Waterland, dan Six Water Games. Dari adanya berbagai potensi tersebut Weleri menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Kendal yang maju akan perekonomiannya dan menjadi salah satu daerah yang berkembang.

Kabupaten Kendal merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi dan prospek yang lebih daripada daerah lainnya di Jawa Tengah. Kabupaten Kendal menjadi daerah yang memiliki daya tarik skala nasional maupun internasional. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Kawasan Industri Kendal (KIK) yang melibatkan 2 (dua) negara yaitu Indonesia dan Singapura yang dapat menarik perhatian internasional. Selain itu, lokasi Kabupaten Kendal sangat strategis karena dekat dengan bandara, memiliki pelabuhan sendiri, memiliki kawasan industri sendiri yaitu KIK yang kini menjadi Kawasan Ekonomi Khusus, dilewati rel kereta api Jalur Ganda Jakarta-Surabaya, dan memiliki jaringan jalan tol nasional. Wilayah Kendal dapat dengan mudah diakses baik lewat jalur laut, udara, maupun darat yang bisa diakses melalui jalan utama di Pulau Jawa dikarenakan posisinya strategis yang berada di jalan raya pantura Jawa.

Adanya letak Kabupaten Kendal yang strategis dengan *tagline* Kendal Permata Pantura, Kendal memiliki prospek lebih sebagai pusat perekonomian. Kendal berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 7% di Jawa Tengah. Hal tersebut didukung dengan adanya pembangunan Pelabuhan Niaga Kendal yang diberi dukungan oleh baik pemerintah provinsi maupun

pemerintah pusat dimana pelabuhan tersebut akan menjadi pelabuhan utama yang merupakan bagian dari Pelabuhan Tanjung Emas. Dibangunnya pelabuhan tersebut diharapkan dapat memperlancar arus barang baik untuk bahan baku, bahan penolong yang ada di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Kendal.

2.1.2. Kondisi Demografis

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kendal, 2018

No	Kecamatan	Σ	Luas	Kepadatan	Jenis Kelamin		Sex Ratio
					L	P	
1.	Plantungan	29.555	48,82	605	16.284	15.587	104,47
2.	Sukorejo	62.592	76,01	823	30.017	28.425	105,60
3.	Pageruyung	32.868	51,43	639	18.071	17.151	105,36
4.	Patean	50.753	92,44	549	26.101	25.132	103,86
5.	Singorojo	50.479	119,32	423	26.155	25.693	101,80
6.	Limbangan	32.691	71,72	460	17.392	17.094	101,74
7.	Boja	79.178	64,09	1.235	37.967	37.549	101,11
8.	Kaliwungu	64.100	47,73	1.343	30.804	30.605	100,65
9.	Kaliwungu Selatan	48.743	65,19	748	23.882	23.467	101,77
10.	Brangsong	47.952	34,54	1.388	25.076	24.450	102,56
11.	Pegandon	35.057	31,12	1.127	19.158	19.069	100,47
12.	Ngampel	32.625	33,88	963	18.008	17.782	101,27
13.	Gemuh	46.802	38,17	1.226	26.100	25.787	101,21
14.	Ringinarum	32.876	23,50	1.399	18.799	18.072	104,02
15.	Weleri	58.137	30,28	1.920	30.309	29.858	101,51
16.	Rowosari	47.533	32,64	1.456	26.472	26.118	101,36
17.	Kangkung	44.673	38,98	1.146	25.007	24.913	100,38
18.	Cepiring	49.131	30,08	1.633	26.273	26.393	99,55
19.	Patebon	59.336	44,30	1.339	29.750	29.413	101,15
20.	Kendal	58.957	27,49	2.145	28.821	28.682	100,48
	Jumlah	964.308	1.001,73	963	500.446	491.240	101,87

Sumber: *Kendalkab.bps.go.id*, 2019

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, Jumlah penduduk Kabupaten Kendal tahun 2018 tercatat sebanyak 964.308 jiwa terdiri dari 488.689 (50,68 persen) laki-laki dan 475.619 (49,32 persen) perempuan. Penduduk terbesar ada di

Kecamatan Boja 79.178 jiwa atau 8,21 persen dari total penduduk yang ada di Kabupaten Kendal. Sedangkan kecamatan yang jumlah penduduknya paling sedikit adalah Kecamatan Plantungan dengan jumlah penduduk 29.555 jiwa atau 3,06 persen dari total penduduk di Kabupaten Kendal.

Sementara itu, jumlah penduduk Kabupaten Kendal menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2018 tercatat sebanyak 941.672 jiwa terdiri dari 500.446 (50,46 persen) laki-laki dan 491.240 (49,54 persen) perempuan. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal, jumlah keluarga (KK) pada tahun 2018 tercatat sebanyak 306.236 keluarga (KK). Dari jumlah tersebut 84,52 persen kepala keluarganya adalah laki-laki, dan 15,48 persen merupakan keluarga dengan kepala keluarga perempuan.

Secara umum, kecamatan Boja merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak dimana terdapat 75.516 jiwa atau 7,61 persen dari total penduduk Kabupaten Kendal. Sedangkan kecamatan Plantungan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu sebanyak 31.871 jiwa atau 3,21 persen dari total penduduk Kabupaten Kendal.

Daerah di Kabupaten Kendal dengan kepadatan penduduk (km^2) tertinggi adalah Kecamatan Kendal yaitu 2.145 per km^2 . Sedangkan daerah dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Singorojo yaitu 423 per km^2 . Kecamatan Kendal merupakan kecamatan terpadat dikarenakan Kecamatan Kendal merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Kendal. Selain itu, Kecamatan Kendal berperan sebagai pusat pemerintahan, administrasi, kesehatan, maupun

sebagai pusat ekonomi di Kabupaten Kendal sehingga banyak masyarakat yang pindah ke Kecamatan Kendal karena segala kebutuhan manusia dapat dengan mudah terpenuhi. Sedangkan Kecamatan Singorojo menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk paling sedikit dikarenakan daerah Kecamatan Singorojo merupakan dataran tinggi yang jauh dari pusat kota sehingga sedikit orang-orang yang tinggal disana.

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kendal, 2018

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Presentase
	Laki-Laki	Perempuan		
0-4	31.705	30.049	61.754	6,23
5-9	41.406	38.881	80.287	8,10
10-14	37.569	35.438	73.007	7,36
15-19	37.402	36.052	73.454	7,41
20-24	39.958	38.839	78.797	7,95
25-29	41.433	39.667	81.100	8,18
30-34	41.924	40.188	82.112	8,28
35-39	40.878	40.668	81.546	8,22
40-44	36.414	37.166	73.580	7,45
45-49	33.312	35.100	68.412	6,90
50-54	32.114	33.861	65.975	6,65
55-59	29.048	28.887	57.935	5,84
60-64	22.595	21.385	43.980	4,43
65-69	15.236	13.561	28.797	2,90
70-74	7.553	8.413	15.966	1,61
>=75	11.899	13.085	24.984	2,52
Jumlah	500.446	491.240	991.686	100

Sumber: Kendalkab.bps.go.id, 2019

Berdasarkan tabel 2.2. terlihat bahwa struktur penduduk di Kabupaten Kendal telah mengalami penuaan. Suatu daerah dikatakan telah mengalami penuaan penduduk jika komposisi penduduk berusia 60 tahun ke atas sudah mencapai 10 persen. Pada tahun 2018, jumlah penduduk usia 60 tahun ke atas di

Kabupaten Kendal telah mencapai 11,47 persen. Penuaan penduduk terjadi karena menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya harapan hidup.

Secara umum, kecamatan Boja merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak dimana terdapat 75.516 jiwa atau 7,61 persen dari total penduduk Kabupaten Kendal. Sedangkan kecamatan Plantungan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu sebanyak 31.871 jiwa atau 3,21 persen dari total penduduk Kabupaten Kendal.

Secara umum *sex ratio* di Kabupaten Kendal tidak banyak berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, *sex ratio* Kabupaten Kendal hampir mencapai 102. Hal menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Di antara 100 orang penduduk perempuan, terdapat 102 penduduk laki-laki. Fenomena ini terjadi di seluruh kecamatan, dengan nilai tertinggi di Kecamatan Sukorejo mencapai hampir 106 dan yang terendah ada di Kecamatan Cepiring senilai 99,55.

Terdapat hal menarik mengenai *sex ratio* menurut kelompok umur di Kabupaten Kendal. Pada tahun 2018, walaupun secara total jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan, namun pada kelompok umur 25-34 tahun perbedaan ini cukup besar. *Sex ratio* pada kelompok umur 25-34 tahun mencapai 104. Hal ini mungkin disebabkan masih banyaknya tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri didominasi oleh wanita berusia 25-34 tahun.

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Produktif dan Tidak Produktif

Kelompok Umur	Jumlah	Presentase
0-14	215.048	21,69
15-64	706.891	71,28
65 keatas	69.747	7,03
Jumlah	991.686	100

Cara menghitung angka ketergantungan= $DR = \frac{P_{0-14} + P_{65+}}{P_{15-64}} \times 100$

Dimana:

DR = rasio beban ketergantungan (dependency ratio)

P_{0-14} = jumlah penduduk usia 0-14 tahun

P_{15-64} = jumlah penduduk usia 15-64 tahun

P_{65+} = jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas

Maka dihitung:

$$DR = \frac{215.048 + 69.747}{706.891} \times 100$$

$$DR = \frac{284.795}{706.891} \times 100$$

$$DR = 40,29$$

Angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kabupaten Kendal tahun 2018 tercatat sebesar 40,29. Artinya, 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Kendal pada tahun 2017, selain menanggung dirinya sendiri, harus menanggung 40 penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Pada tahun 2030, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi yang dimana jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Hal ini menimbulkan adanya keterkaitan angka ketergantungan dengan bonus demografi di Kabupaten Kendal antara lain penduduk usia produktif di Kabupaten Kendal mencapai 706.891 atau 71,28% dari keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Kendal. Dari banyaknya penduduk usia produktif tersebut diartikan mereka bekerja atau siap bekerja serta menjadi stok usia yang bisa didayagunakan sebagai tenaga kerja di Kabupaten Kendal untuk memasuki pasar pekerjaan, khususnya dengan adanya pengembangan Pelabuhan Kendal dan Kawasan Industri Kendal yang sekarang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat menjadi peluang bagi penduduk usia produktif dalam mendapatkan pekerjaan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.

2.1.3. Kondisi Pemerintahan

Sesuai Pasal 223 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kecamatan diklasifikasikan sebagai berikut:

- (1) Kecamatan diklasifikasikan atas:
 - a. Kecamatan tipe A yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang besar; dan
 - b. Kecamatan tipe B yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang kecil.
- (2) Penentuan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah desa/kelurahan.

Perbedaan klasifikasi kecamatan menurut UU Nomor 23 tahun 2014 yang kemudian diatur di dalam PP Nomor 19 Tahun 2008 Struktur Organisasi Kecamatan bisa berpola Maksimal dengan 5 Kepala Seksi dan bisa berpola Minimal dengan 3 Kepala Seksi. Untuk sekarang ini Kecamatan diatur dengan klasifikasi Tipe A (Kecamatan yang beban kerjanya besar) dan klasifikasi Tipe B (Kecamatan dengan beban kerja yang kecil).

Sejak disahkannya Perda Nomor 5 tahun 2006, wilayah Kabupaten Kendal secara administratif terbagi dalam 20 kecamatan dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kota Kendal. Hingga saat ini, tidak ada perubahan jumlah kecamatan dan desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Kendal dimana dari 20 kecamatan yang ada, terbagi lagi menjadi 266 desa dan 20 kelurahan. Jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di Kecamatan Kendal, yaitu sebanyak 20 kelurahan. Sementara jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Kaliwungu Selatan, dengan 8 desa. Keseluruhan 20 kecamatan di Kabupaten Kendal tersebut termasuk ke dalam kecamatan tipe A.

Dinamika Politik Kendal dicerminkan dari Pemilu terakhir yang dilaksanakan oleh Kabupaten Kendal pada tahun 2014, yang diikuti oleh total sebanyak 12 parpol. Dari hasil Pemilu Legislatif tahun 2014 tersebut, dipilih sejumlah 45 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal, dengan posisi kursi terbanyak diraih oleh PDI Perjuangan dengan total perolehan suara sebanyak 115.473 suara. Selanjutnya disusul oleh Partai Kebangkitan Bangsa 86.176 suara, dan Partai Amanat Nasional 64.986 suara. Jumlah suara sah sebanyak 561.207. Selama tahun 2018, banyaknya produk

hukum yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Kendal ada sebanyak 65 produk, yang terdiri dari 21 Perda, 22 Keputusan DPRD, 15 Keputusan Banmus dan 7 Panitia Anggaran. Bila dibandingkan tahun sebelumnya maka jumlah keputusan yang dihasilkan DPRD kabupaten Kendal pada tahun 2018 ini mengalami peningkatan sebanyak 25 keputusan.

2.2. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal

Secara administratif, Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal merupakan institusi dari pemerintah yang bertugas mengatur transportasi dan membangun fasilitas dan sarana prasarana pendukung dalam pengembangan Pelabuhan Kendal. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kendal juga bekerja sama dengan PT. Pelindo III dalam pengembangan Pelabuhan Kendal sehingga memiliki kerja sama dan peran Dinas Perhubungan yang besar terhadap pengembangan tersebut.

2.2.1. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal antara lain seperti berikut.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
2. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan

Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 52 Seri D No. 7);

3. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 26).

2.2.2. Visi dan Misi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi Dinas Perhubungan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi Dinas Perhubungan.

Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Dinas Perhubungan. sebagai berikut: “Terwujudnya Transportasi Yang Aman, Murah Dan Efisien Yang Didukung Sumber Daya Manusia Yang Mempunyai Daya Saing”.

Untuk memenuhi visi tersebut, Dinas Perhubungan menjabarkannya ke dalam 4 (empat) misi yaitu:

- a. Mewujudkan pengelolaan lalu lintas yang aman dan efisien.
- b. Membentuk Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan yang berkualitas dan berbudi pekerti yang luhur.
- c. Menerapkan uji kendaraan sesuai kebutuhan.
- d. Membangun transportasi yang ramah lingkungan dan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kendal.

2.2.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan administrasi di bidang perhubungan daerah;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang perhubungan;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perhubungan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perhubungan;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perhubungan.

2.2.4. Struktur Organisasi

Untuk menunjang kinerja Dinas Perhubungan dalam kegiatan pembangunan maka penataan susunan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal, yaitu:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Angkutan

- a. Seksi Angkutan Darat
- b. Seksi Pelayaran dan Angkutan Laut
- 4. Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana
 - a. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - b. Seksi Perbengkelan dan Kendaraan Tidak Bermotor
- 5. Bidang Lalu–Lintas
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu–Lintas
 - b. Seksi Pengendalian Operasional dan Perparkiran
- 6. UPTD
 - a. UPTD Pelabuhan Penyeberangan Kendal
 - b. UPTD Pengelolaan Terminal

2.2.5. Keterkaitan dengan Pembangunan Pelabuhan Kendal

Salah satu bidang utama di Dinas Perhubungan Kendal yang mengoordinasi tentang pembangunan Pelabuhan Kendal yaitu Bidang Angkutan khususnya Seksi Pelayaran dan Angkutan Laut. Selain itu, terdapat unit pelaksana teknis yang menangani Pelabuhan Kendal yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Penyeberangan Kendal.

UPTD Pelabuhan Penyeberangan Kendal memiliki tugas utama yaitu menyusun program kerja, memimpin, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengawasi, membina dan menilai pelaksanaan tugas dan kegiatan teknis dinas di Bidang Pengelolaan Pelabuhan. Selain itu, UPTD Pelabuhan Penyeberangan Kendal memiliki fungsi antara lain seperti:

- a. menyusun program kerja di pelabuhan;

- b. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pelabuhan;
- c. pelaksanaan pemungutan retribusi berkaitan dengan pengelolaan pelabuhan;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- e. pembinaan aparatur;
- f. pengelolaan keuangan;
- g. pengawasan terhadap lalu lintas pelayaran pelabuhan;
- h. pelaksanaan pemungutan retribusi yang berkaitan dengan pengelolaan pelabuhan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2.2.6. Latar Belakang Pembangunan Pelabuhan Kendal

Beberapa poin mengenai latar belakang pembangunan Pelabuhan Kendal antara lain:

- a. Pada awalnya pembangunan Terminal Kendal adalah sebagai Terminal Penyeberangan yang akan melayani angkutan penyeberangan lintas Kendal-Kumai (Kalimantan Tengah), adapun wewenang di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- b. Adanya stagnasi pelayanan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang terutama angkutan tongkang yang memuat batu bara dan kayu log.
- c. Terminal Kendal merupakan bagian dari rencana kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam penyediaan infrastruktur bagi pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) Kendal.
- d. Sesuai dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran maka perlu adanya sebuah organisasi baru dalam bentuk Badan Usaha Pelabuhan

(BUP) yang akan berperan sebagai operator di Terminal Kendal untuk mengelola angkutan penyeberangan dan angkutan niaga. BUP tersebut dapat berupa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kendal atau BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau merupakan kerja sama BUMD Kabupaten Kendal dengan BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2.2.7. Kondisi Pelabuhan Kendal Sekarang

Berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Kendal Nomor 18 Tahun 2013 yang merencanakan pembangunan Pelabuhan Kendal bahwa Pelabuhan Kendal merupakan pelabuhan dengan status tahap I: pelabuhan *passenger*/umum, dan tahap II: pelabuhan curah kering/niaga. Sebagai pelabuhan tahap I pelabuhan *passenger*/umum, Pelabuhan Kendal melayani penyeberangan rute Kendal-Kumai dengan jadwal 2 kali seminggu. Sebelumnya, Pelabuhan Penyeberangan Kendal memiliki rute lain yaitu Kendal-Karimunjawa. Namun rute tersebut dihapuskan dikarenakan peminatnya masih sedikit. Rute Kendal-Karimunjawa diberhentikan dan dihapuskan sejak Agustus 2017.

Ijin operasional Pelabuhan Kendal dalam tahap II sebagai pelabuhan curah kering/niaga sudah turun per tanggal 4 September 2019 melalui SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/36 Tahun 2019 dan Pelabuhan Kendal sebagai pelabuhan pengumpan regional.

Sejak turunnya SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/36 Tahun 2019 tentang Pemberian izin pengoperasian dermaga *multipurpose* pelabuhan pengumpan regional di Kabupaten Kendal kepada penyelenggara pelabuhan

kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas untuk ABUPI yang akan bekerjasama dalam pengelolaan pelabuhan Kendal harus melalui Penyelenggara Pelabuhan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas, baik untuk wilayah laut maupun wilayah darat yang berada di pelabuhan.

Pelabuhan Niaga Kendal diresmikan pada tanggal 16 September 2019 oleh Bupati Kendal, dr. Mirna Annisa, M.Si. Namun dalam operasionalisasinya, Pelabuhan Niaga Kendal masih terkendala pada kedalaman dermaga dikarenakan dermaga mengalami pendangkalan yang semula memiliki kedalaman lima meter, sekarang hanya tiga meter, untuk menyikapi keluar-masuk kapal yang berlabuh masih harus mengandalkan pasang surutnya air laut. Meskipun masih terkendala kedalaman dermaga, setidaknya kapal-kapal yang sebelumnya sudah antri lama di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dapat merapat di Pelabuhan Niaga Kendal terlebih dahulu. Terkait dengan pendangkalan dermaga pelabuhan yang makin parah, Bupati Kendal sudah berkordinasi dengan KSOP untuk bisa melakukan pengerukan sehingga kedalaman dermaga sesuai dengan kapasitas yang ada untuk kapal-kapal dengan kedalaman lima meter.

2.2.8. Prospek Pelabuhan Kendal Mendatang

Pembangunan Pelabuhan Kendal, segala rencana pembangunannya telah diatur dalam Rencana Induk Pelabuhan Kendal. Selain itu, Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Emas juga berkaitan dengan pembangunan Pelabuhan Kendal. Dalam Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Emas Tahun 2013, Pelabuhan Kendal akan dikembangkan sebagai terminal yang melayani log, batubara, dan curah cair.

Untuk mendukung kegiatan operasional, Terminal Kendal memiliki fasilitas darat dan fasilitas laut yang diantaranya alur pelayaran, dermaga, dan pelabuhan, dan ruang tunggu penumpang.

Rencana pengembangan Pelabuhan Kendal mendatang tertuang pada kegiatan DESK bidang Perhubungan di Bappeda Provinsi Jawa Tengah untuk dukungan/kesiapan pembangunan menuju percepatan ekonomi Jawa Tengah sebesar 7% yang rinciannya sebagai berikut.

1. Kegiatan peningkatan jalan dan drainase jalan akses Pelabuhan Kendal-Jalan Arteri Kaliwungu. Perlu penyelesaian pembangunan jalan pelabuhan lajur barat beserta drainasenya (jalan eksisting 4,2 km); di sebelah kanan dan kiri jalan lajur barat juga akan dibangun drainase dengan usulan anggaran total 100M.
2. Pembangunan Kendal *Seaport (Container Port)* dengan kapasitas 1,5 Juta/Teus. Untuk studi kelayakan dan DED kegiatan tersebut sudah dilaksanakan pada tahun 2013 oleh PT.Pelindo dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal dengan tahapan sesuai Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, dengan kegiatan fisik akan dimulai dari tahun 2020-2024.
3. Pembangunan Interchange di Jalan Arteri Kaliwungu ke Kawasan Industri Kendal (KIK) yaitu pembangunan *Fly Over* (Jembatan layang) di Jalan Arteri Kaliwungu yang menuju akses ke Pelabuhan Kendal. Hal tersebut memerlukan kesiapan lahan (pembebasan lahan) di sekitar *Fly Over* tersebut. Ada 2 usulan kegiatan pembangunan *Fly Over*, yaitu:

- a. *Fly Over* menuju jalan Pelabuhan Kendal (usulan anggaran 100M).
 - b. *Fly Over* menuju jalan KIK (usulan anggaran 100M).
4. Pembangunan *Outer Ring Road* Kendal–Semarang–Demak.
5. Pembangunan akses kereta api menuju Kendal *Seaport*.